

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar belakang Masalah

Perkembangan Teknologi dan Informasi (TIK) terus mengalami perkembangan yang begitu pesat setiap tahunnya, baik dalam hal media elektronik lingkup pemerintah atau non-pemerintah. Hal tersebut merupakan membawa peluang bagi Negara Indonesia untuk melakukan pengembangan dari segi pengelolaan, pengaksesan serta pemberdayaan sistem informatika agar dapat berguna secara tepat, akurat dan cepat sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan. Pengembangan serta kemajuan teknologi dapat terjadi disetiap negara, di Indonesia sendiri memulai rintisan sebuah sistem teknologi dan komunikasi berbasis elektronik. Tanpa memiliki kemahiran dalam bidang *Information and Technology* (IT), sangat sulit dalam zaman era global saat ini untuk kita memiliki budaya berdaya saing tinggi untuk memberi pelayanan yang lebih baik lagi kepada *customer* (Indrajit, 2002).

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis elektronik di lingkup pemerintahan Indonesia dengan tujuan untuk membantu kinerja dalam hal pelayanan publik dikenal dengan *Electronic Government* atau sering disebut *E-Government*. Definisi *E-Government* menurut Bank Dunia (*World Bank*) ialah suatu penyelenggaraan sistem berbasis elektronik (IT) yang digunakan dalam ranah pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan pelayanan publik yang baik, serta beberapa golongan pembisnis dan kelompok terkait untuk

menuju *good government* (Indrajit, 2002). Sistem elektronik ini diciptakan untuk meningkatkan kembali hal-hal dalam pelayanan publik. Adapun fungsi lain dari penerapan *e-government* yaitu menciptakan suatu pelayanan publik agar lebih efisien, efektif dan transparansi.

Penerapan aplikasi *e-government* di Indonesia dijamin dalam payung hukum, yang berbunyi pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 pasal 34 pada ayat 1 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjelaskan bahwa “aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan SPBE”. Jika dilihat dalam jurnal Yunita, N.P dan Aprianto, R.D (2018) menjelaskan bahwa, kondisi penerapan *e-government* lingkup pemerintahan di Indonesia masih sangat kurang karena terdapat permasalahan, permasalahan tersebut dilihat dari beberapa aspek , antara lain seperti pada aspek infrastruktur, kebatasan SDM, kebijakan serta pada aplikasi dan perencanaan. penyebab dari suatu kegagalan tersebut dikarenakan banyaknya pandangan dan pemahaman terkait dari konsep *e-government* yang belum benar atau tidak sesuai. Adapun pandangan dari (Mustofa, 2014) menjelaskan bahwa kegagalan dalam penerapan *e-government* di Indonesia dikarenakan tidak memadainya sumber daya informasi yang ada.

Provinsi Bangka Belitung sudah menerapkan *e-government* yakni seperti *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-laporan*, namun belum sangat optimal. Adapun nilai pengoptimalan yang didapatkan oleh Provinsi Bangka Belitung, skala angka 1-10 maka

penerapan *e-government* di Bangka Belitung hanya menginjak pada angka 7. Maka dari itu harus perlu kenaikan angka pertahunnya untuk lebih mengoptimalkan penerapan *e-government*. Adapun penyebab dari kurang optimalnya penerapan *e-government* di Provinsi Bangka Belitung antara lain karena di beberapa kabupaten di Provinsi Bangka Belitung masih memiliki *blank spot*, sumber daya manusia yang kurang memadai, dan sarana penduduk lainnya, hal tersebut membuat kendala dalam hal pengaksesan sehingga penerapan *e-government* masih sulit digunakan setiap kabupaten-kabupaten di Provinsi Bangka Belitung <https://bangka.tribunnews.com/2018/04/26/penerapan-e-government-di-babel-belum-optimal>.

Perencanaan dan pembangunan menurut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa perencanaan dan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang tentu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu disuatu daerah. Proses perencanaan pembangunan menjadi suatu proses yang sangat penting bagi setiap masing-masing daerah hal tersebut memberi acuan bahwa setiap daerah harus meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam membuat suatu perencanaan dengan harapan suatu perencanaan daerah tersebut dapat berjalan secara efektif, transparansi dan efisien sesuai dengan yang telah direncanakan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada bagian kedua pasal 262 menjelaskan bahwa “perencanaan dan pembangunan daerah dirumuskan dengan menggunakan prinsip

transparansi, responsif, efisien, akuntabel, efektif, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan”. Untuk menepis kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dikemudian hari maka pemerintah daerah harus mengambil upaya-upaya penerapan sistem aplikasi *E-Planning* untuk memudahkan dalam menginput data dalam perencanaan daerah. Sehingga proses perencanaan dan pembangunan mampu mewujudkan *good government* dan sehingga dapat meminimalisir penyelewengan yang dapat menguntungkan pihak lain dapat teratasi dengan baik.

Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi selama dalam penerapan *E-Planning* oleh SKPD seperti masih adanya kesulitan yang dialami oleh SDM dalam hal menyusun dokumen dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam penggunaan, kesulitan dalam hal penyusunan anggaran dan realisasi kinerja atau dukungan data dari beberapa instansi, kesulitan dalam hal menganalisa pencapaian kinerja, dan serta aplikasi e-planning yang digunakan sebagai pembangunan kurang relevan dengan aplikasi lainnya. Adapun kesulitan lain yang biasa terjadi dalam penerapan antara lain seperti sering adanya perubahan ataupun penyesuaian terhadap batas waktu perencanaan setiap tahun dalam dokumen Renstra sehingga masih menjadi tidak ada kejelasan, apakah perlu atau tidak dalam melakukan penyesuaian atau perubahan. Tentu hal tersebut akan berdampak pada penyulitan dalam hal penyusunan anggaran prioritas untuk menjadikan suatu anggaran tersebut efisiensi dan efektivitas anggaran, sehingga untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka harus membutuhkan tindakan lebih.

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 menjelaskan tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, di dalam pasal 30 ayat 1 menjelaskan bawa “Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah”. Hal tersebut menjadi pokok acuan untuk melakukan pembangunan dalam pengembangan suatu sistem informasi dalam lingkup perencanaan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah menerapkan teknologi berbentuk suatu aplikasi yaitu SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) atau sering disebut *Planning Support System* atau disebut juga *e-planning*. Dalam *e-planning* berisikan tentang program-program RPJMD selama 5 (lima) tahun kedepan, mulai dari kegiatan musrembang pada tingkat kecamatan sampai kabupaten hingga dalam disahkannya Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam Forum SKPD, dan proses KUA-PPAS sehingga lebih efektif, transparan, cepat, konsisten dan terintegrasi sesuai pada payung hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Tujuan dibentuknya sebuah aplikasi *e-planning* tertuang dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menjelaskan bahwa dibentuknya aplikasi *e-planning* agar mempermudah pemerintah daerah dalam perencanaan dan pembangunan serta sebagai sistem pendukung perencanaan disuatu daerah.

Provinsi Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Bangka Selatan salah satu kabupaten yang telah menerapkan aplikasi *e-planning* sejak tahun 2017 hingga

sekarang. Dari beberapa hasil penelaahan yang didapatkan dalam pra penelitian pada tanggal 28 Desember 2019 bersama Ibu Renanda Satiawati, S.IP., M.AB, didapatkan beberapa yang menjadi suatu masalah dalam penerapan *e-planning* di Kabupaten Bangka Selatan, yaitu: 1. Penggunaan *e-planning* oleh BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan kurang efisien. Hal tersebut dapat ditunjukkan masih adanya kesulitan yaitu *e-planning* yang kurang sinkron dengan SIMDa (Sistem Informasi Keuangan Daerah) sehingga harus memakan waktu lebih untuk menyinkronkan antara *e-planning* dengan SIMDa (Sistem Informasi Keuangan Daerah) pengelolaan tersebut termasuk dalam hal seperti kegiatan dan penomoran rekening program. 2. Dilihat dari sisi transparansi, maka penerapan aplikasi *e-planning* di Kabupaten Bangka Selatan masih belum transparansi. Masih terdapat kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui bagaimana perkembangan sebelum dan sesudah diterapkannya aplikasi tersebut.

Dilatar belakangi oleh permasalahan diatas yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Bangka Selatan maka, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana penerapan *e-planning* di Kabupaten Bangka Selatan. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian berbentuk skripsi dengan judul “**Penerapan Aplikasi E-Planning Dalam Meningkatkan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Oleh Bappeda Di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2018**”.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui:

Bagaimana penerapan *E-Planning* dalam meningkatkan perencanaan dan pembangunan daerah oleh BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2017-2018?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini sebagai berikut :

Untuk menganalisis penerapan *E-Planning* dalam meningkatkan perencanaan dan pembangunan daerah oleh BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2017-2018.

4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

4.1 Manfaat Secara Teoritis

- a. Dilihat dari sudut pandang teoritis, maka penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemikiran ataupun wawasan serta pengetahuan yang baru terhadap pembaca khususnya peneliti.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan.

4.1 Manfaat Secara Praktis

a. Pengambil kebijakan/stakeholder

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan, pertimbangan serta masukan bagi pemerintah daerah dalam penggunaan aplikasi *E-Planning* selama penerapan aplikasi *E-Planning* di BPPPPD. Dengan tujuan agar pemerintah lebih meningkatkan kembali penggunaan pada sistem *E-Planning*.

b. Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai wahana bagi mahasiswa dalam pemahaman keadaan lapangan, membandingkan sejauhmana pengetahuan teoritis mampu diterapkan ke dalam kondisi empiris, mendeteksi masalah yang ada serta mendapatkan keterampilan dan inovasi dalam pemecahan masalah-masalah yang ada dilapangan tersebut. Serta dijadikan gambaran untuk terjun ke lapangan nantinya saat menjadi pegawai daerah.

5 Tinjauan Pustaka

Dalam Penelitian ini penulis mengambil sebanyak 10 (sepuluh) studi terdahulu yang sesuai dengan gambaran yang sesuai dengan deskripsi terkait penerapan aplikasi *e-planning* dalam meningkatkan perencanaan dan pembangunan daerah oleh Bappeda Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2018. Berikut merupakan studi terdahulu berupa beberapa studi terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Tabel 1. 1
Studi Terdahulu

| NO | Nama penulis | Judul | Review |
|----|--|---|---|
| 1. | Rizka Khoirunnisak, Desy Arishanti, dan Dien Dadeka Vebrianti (2017) | Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai Good Governance | Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai Good Governance, bisa menjadi sebagai acuan bagi pemerintahan lainnya di indonesia. Dilihat dari kualitas SDM, pengembangan aplikasi, perbaikan sistem, serta inovasi-inovasi terus ditingkatkan untuk mencapai good governance melalui aplikasi e-budgeting di surabaya. Adapuntujuan dari penelitian |

| | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| | | | <p>ini yaitu untuk mengetahui gambaran implementasi aplikasi e-budgeting di surabaya dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan aplikasi e-budgeting di kota surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.</p> |
| 2. | Egis Tektona Grandis (2019) | Efektivitas Penerapan E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar | <p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas sistem E-Planning program pembangunan daerah di BAPPEDA di Kota Banjar Menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa sebagian besar ketercapaian pengusulan program kegiatan disetiap OPD sudah dilakukan dengan baik. Keuntungan yang dapat dilihat dari seluruh sistem dokumen terkunci dan terdokumentasi dalam bentuk softcopy dan dapat menghemat waktu dalam meng-input data, sehingga sistem E-Planning sangat</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | <p>mendapat respons yang baik oleh pegawai masing-masing OPD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.</p> |
| 3. | <p>Balgi Fahmi Sani, Harianto, A Faroby Falatehan (2017)</p> | <p>Strategi Kesiapan Pemerintah Kota Bogor Dalam Penerapan Pembangunan Berbasis E-Planning</p> | <p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa strategi kesiapan pemerintah Kota Bogor dalam penerapan pembangunan berbasis E-Planning menunjukkan bahwa keselarasan antara menu input E-Planning dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 mencapai angka 90%, berdasarkan hasil analisis regresi logistik SDM dan sistem informasi sangat berpengaruh secara signifikan mempengaruhi kesiapan penerapan e-planning, dan dalam analisis SWOT yang mendapatkan strategi yang paling tinggi yaitu pada <i>Weakness-Opportunity</i> yang mana terdapat Tingkatkan kualitas SDM khususnya para</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | operator e-planning dan tingkatkan kesiapan berbagai faktor untuk menunjukkan komitmen terhadap penerapan e-planning. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode mix method. |
| 4. | Virgina Ningsih, Ria Nelly Sari dan Muhammad Rasuli (2018) | Analisis Penerapan E-Planning dan E-Budgeting Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis) | Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih adanya beberapa kendala dalam penerapan yaitu masih terbatasnya SDM yang ada di Kabupaten Bengkalis, keterbatasan infrastruktur misalnya jaringan sehingga hanya bisa diakses di beberapa tempat saja, belum jelasnya regulasi dalam hal revisi Peraturan Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 terkait dengan urusan dan kode rekening kegiatan yang ada dalam SIPKD dan Peraturan Bupati, aplikasi SIPKD masih terdapat kekurangan terkait dalam hal fitur ataupun program. Metode penelitian yang digunakan |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. |
| 5. | Harry Patrick Paat, Edward Fredrik, dan Meily Y.B Kalalo (2018) | IPTEKS Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Utara | Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Bappeda di Sulawesi Utara sudah melaksanakan tahap penginstalan aplikasi, penginputan RPJMD, analisis satuan belajar (ASB) dan standar satuan harga (SSH)dalam aplikasi e-planning. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bappeda Sulawesi Utara sudah mengimplementasi aplikasi e-panning dengan semestinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. |
| 6. | Ahmad Haidar Mirza (2014) | Model E-Planning untuk Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatra Selatan | Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa model e-planning yang dihasilkan dapat diimplementasikan untuk membantu proses perencanaan pembangunan dan dapat merespon usulan dari masyarakat pedesaan hingga |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | <p>kecamatan sehingga pemerintah dapat menetapkan prioritas pembangunan terhadap daerah yang membutuhkan sehingga dapat tercipta pemerataan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatra Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.</p> |
| 7. | Harmadhani Adi Nugraha dan Yuli Widi Astuti (2013) | <p>Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan kabupaten Nganjuk)</p> | <p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa analisis peneraan system informasi manajemen keuangan daerah (simda keuangan) dalam pengolahan data keuangan pada organisasi pemerntahan daerah pada dinas kesehatan kabupaten nganjuk, seluruh management keuangan pada dinas kesehatan kabupaten nganjuk sudah terintegrasi sesuai dengan prosedur pengelolaan, tujuan pengelolaan dinas kesehatan dikabupaten nganjuk juga</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>sudah sangat memadai, dan aplikasi simda ini telah menghasilkan laporan keuangan yang relevansi, tepat waktu dan akurasi yang baik dibandingkan dengan proses secara manual. Namun terdapat permasalahan yakni seperti belum dapat digunakannya fungsi menu pembukuan/akuntansi secara maksimal oleh admin simda dan pengkoreksian data yang diterbitkan oleh SP2D membuat rumit pengerjaan sehingga sangat menghambat proses pengkoreksian tersebut. Adapun tujuan dari peneliti yaitu untuk menjelaskan dan pengendalian internal yang diterapkan dalam pengelolaan data keuangan melalui SIMDA, dan untuk menganalisa kualitas informasi yang dihasilkan oleh SIMDA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.</p> |
|--|--|--|

| | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|
| 8. | Darmawan Napitupulu (2015) | Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Goverenment Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor | Hasil penelitian dengan judul Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Goverenment Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor menjelaskan bahwa erdapat CSF yang dapat membantu menghindari kegagalan dlam proyek e-government, Kota Bogor telah mendapatkan beberapa unit penghargaan sehingga e-government di kota bogor layak dijadikan contoh bagi pemerintahan daerah lainnya, dan dalam 50 factor sukses CSF dapat digunakan pemerintah sebagai terhindar dari kegagalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan Kuantitatif. |
| 9. | Sune D. Muller and Sofie Skau (2015) | Success Factor Influencing Implementation of E-Government at Different Stages of | Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada 6 (enam) faktor keberhasilan yang mempengaruhi pada tahap perkembangan e-government antara lain seperti lingkungan eksternal, organisasi, |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | | Maturity: A Literature Review | manajemen, warga negara, karyawan, dan teknologi. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa faktor keberhasilan terendah berada pada organisasi dan teknologi sedangkan faktor keberhasilan tertinggi ditemukan pada kategori manajemen. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memberi gambaran umum tentang literatur e-government dan mengidentifikasi digitalisasi faktor keberhasilan dilihat dari berbagai tingkat kematangan melalui lee model. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. |
| 10. | Lubna Salsabila dan Eko Priyo Purnomo, Ph.D (2017) | Establishing and Implementing Good Practices E-Govenment (A Case Study: e-Government Implementation | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat Korea Selatan berhasil dalam mengimplementasikan e-govenment sehingga faktor tersebut dijadikan patokan oleh Indonesia untuk |

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
| | | between Korea and Indonesia) | mengimplementasikan e-government. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu dipelajari oleh Indonesia dalam mengimplemantasikan e-government di korea selatan yaitu peraturan perundang-undang yang harus lebih spesifik, komunikasi serta integrasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang diperlukan, sumber daya manusia dalam memahami konsep e-government perlu ditingkatkan, serta peran para pemimpin menjadi salah satu kunci utama dalam mensukseskan e-government di Korea Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. |
|--|--|------------------------------|--|

Dari seluruh penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kecocokan dengan penelitian lainnya, di mana studi terdahulu yang di atas sama-sama menjelaskan atau mengkaji tentang penggunaan sistem elektronik berbasis online. Literatur review di atas rata-rata menggunakan

metode penelitian kualitatif untuk memaparkan hasil penelitian, menggunakan teknik analisis dan menggunakan jenis data yang sama dengan penelitian ini. Beberapa penelitian di atas banyak yang mengatakan bahwa dalam meningkatkan suatu kinerja suatu aplikasi harus sesuai dengan konsep E-government.

Pembaharuan dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mencoba meneliti dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis juga dalam pembahasan penelitian menggunakan teori e-government dengan tipe *Government to Government (G2G)* dan variabel dari teori implementasi kebijakan untuk menganalisis yang memiliki tujuan untuk mengukur penerapan media elektronik berbasis online.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang ada di atas, yaitu dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana penerapan aplikasi e-planning dalam meningkatkan perencanaan dan pembangunan oleh Bappeda Kabupaten Bangka Selatan tahun 2017-2018, penelitian ini menggunakan Teknik analisis data menggunakan NVIVO dan studi kasus di Kabupaten Bangka Selatan.

6 Kerangka Teori

6.1 Kebijakan Publik

6.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik menurut pandangan dari Greston (2002) dalam Wahab (2012:16) mengatakan bahwa "*all public policymaking involves government in some way*" yang artinya segala bentuk pembuatan suatu kebijakan melibatkan pemerintah dalam beberapa cara. Segala bentuk kebijakan publik seharusnya berorientasi pada pemecahan masalah yang secara riil yang dihadapi oleh masyarakat atau lainnya, yang secara langsung maupun tidak langsung harus melibatkan pejabat pemerintah.

Sedangkan menurut pandangan David Easton dikutip dalam skripsi dari Adelita Riantini (2016:11) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan dampak aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*), yang artinya bahwa seluruh kegiatan dalam kebijakan publik melibatkan keputusan pemerintah. Pengertian sederhananya kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh negara khususnya lembaga dalam pemerintah, yang memiliki tujuan untuk merealisasikan tujuan negara (Nugroho 2009:85). Seluruh kebijakan publik yang diputusi oleh suatu negara didasarkan pada peraturan perundang-undang yang memiliki sifat mengikat dan memaksa.

Dari pengertian kebijakan publik menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang bersifat mengikat dan memaksa yang diambil, dibuat atau dipilih oleh lembaga pemerintah, hal tersebut menjadi suatu pegangan atau pedoman bagi aparatur pemerintah yang menjalaninya sehingga menciptakan suatu kebijakan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan kebijakan yang sebagaimana mestinya. Kebijakan sering kali diartikan dengan peristilahan lain seperti program, rancangan-rancangan besar, ketentuan-ketentuan, undang-undang, keputusan, usulan-usulan, dan tujuan.

6.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Dalam proses pembuatan suatu kebijakan harus membutuhkan waktu yang cukup lama, karena proses pembuatan kebijakan merupakan suatu proses yang sangat rumit, dengan melibatkan beberapa variabel serta perlunya pengkajian agar dapat berjalan dengan seharusnya. Oleh sebab itu para pejabat pemerintah serta ahli politik tertarik untuk membedah serta mengkaji proses kebijakan publik dalam bentuk beberapa tahap. Tujuan dari dibentuknya beberapa tahap kebijakan publik yakni agar mempermudah dalam mengkaji kebijakan publik.

Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn yang dikutip dalam skripsi Ageng Purwo Jatmiko (2012:19-22) menjelaskan bahwa :

1. Penyusunan Agenda

Pada tahap penyusunan agenda merupakan suatu proses yang penting untuk merealisasikan suatu kebijakan publik. Dalam hal ini, maka para penyusun kebijakan memiliki hak untuk mengkaji apa yang terkait prioritas dan masalah publik dalam mengagendakan suatu kebijakan publik. Dalam mengagendakan suatu kebijakan publik, biasanya yang menjadi acuan yaitu isu kebijakan biasanya menjadi suatu masalah kebijakan. Dalam penyusunan suatu kebijakan hal yang menjadi pertimbangan yaitu seperti esensi kebijakan, tingkat urgensi dan stakeholder yang terlibat.

2. Formulasi Kebijakan

Tahap formulasi kebijakan merupakan tahap lanjutan dari tahap agenda kebijakan. Masalah yang telah ditampung dalam agenda kegiatan, selanjutnya akan dibahas dan pemecahkan dengan masalah yang terbaik oleh para stakeholder yang terlibat dalam kebijakan. Dalam proses pemecahan suatu masalah maka terdapat beberapa alternatif dan atau beberapa pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap ini maka seluruh stakeholder yang terlibat harus bersaing untuk mengusulkan perbaikan masalah dengan baik.

3. Adopsi Kebijakan

Setelah memilah dan memilih dari beberapa usulan alternatif dari kebijakan, maka akan dipilih satu kebijakan yang diyakini dapat memecahkan masalah yang ada dan alternatif tersebut didukung oleh mayoritas legislatif serta beberapa keputusan pengadilan.

4. Implementasi Kebijakan

Pada tahap implementasi kebijakan ini akan dilihat apakah suatu kebijakan yang telah diutuskan tersebut akan berjalan dengan semestinya atau tidak dan ditemukannya dampak dari penerapan suatu kebijakan.

5. Evaluasi Kebijakan

Tahap evaluasi kebijakan merupakan suatu proses penilaian atau evaluasi yang memiliki tujuan untuk melihat sejauhmana suatu kebijakan tersebut terrealisasi serta dapat mengentaskan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah daerah. Dalam mengevaluasi suatu kebijakan, maka ditentukan kriteria-kriteria penilaian yang mengacu pada kebijakan, apakah suatu kebijakan tersebut sudah terrealisasikan dengan sebagaimana mestinya atau tidak.

6.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut pandangan dari Suharno (2010) menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan suatu kebijakan tidak semudah dibayangkan, pembuatannya sangat rumit serta kompleks. Namun para

administrator baik dalam pemerintah ataupun non-pemerintah suatu organisasi diharuskan bertanggung jawab, memiliki kemampuan serta kemauan untuk menerapkan suatu kebijakan agar sesuai dengan harapan ataupun tidak sesuai dengan harapan.

Dalam menerapkan atau mengimplementasikan suatu kebijakan dipengaruhi beberapa faktor. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan yaitu :

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar

Adanya faktor pengaruh tekanan dari luar dalam pembuatan suatu kebijakan bukan suatu hal yang tabu lagi, hal ini disebabkan adanya kepentingan-kepentingan yang menguntungkan para elit politik ataupun pihak luar.

2. Adanya pengaruh dari kebiasaan lama

Adanya pengaruh dari kebiasaan lama menjadi suatu budaya. Kebiasaan lama membawa pemikiran bahwa harus terus diikuti, apalagi jika suatu kebijakan yang telah ada tersebut dinilai berhasil.

3. Adanya pengaruh dari sifat-sifat pribadi

Dari seluruh keputusan kebijakan yang telah ditetapkan tidak jauh dari pengaruh sifat-sifat pribadi seseorang. Hal tersebut karena sifat-sifat pribadi merupakan suatu faktor yang penting dalam penentuan baik itu suatu kebijakan atau keputusan.

4. Adanya pengaruh dari kelompok lain

Faktor dari lingkungan sosial juga menjadi suatu yang sangat berpengaruh dalam pembuatan suatu kebijakan atau keputusan yang bersifat menyeluruh.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Penjelasan dari faktor pengaruh keadaan masa lalu, menjelaskan bahwa jika dalam mengambil ataupun membuat suatu kebijakan maka pengalaman sejarah yang telah lalu akan berpengaruh dalam pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, seseorang dalam melimpahkan wewenang terhadap orang lain perlu adanya pertimbangan karena adanya ketakutan disalahgunakan.

6.2 Perencanaan dan pembangunan Daerah

6.2.1 Pengertian Perencanaan

Menurut pandangan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang diartikan sebagai suatu konsep, program, rancangan sehingga kata perencanaan merupakan suatu cara merencanakan, pembuaan atau suatu prose. Selain itu juga, perencanaan dapat diartikan sebagai kegiatan pengambilan keputusan terkait apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran. Perencanaan merupakan suatu proses yang bersifat terus berlanjut, yang terdiri dari suatu keputusan atau pilihan dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu wilayah atau

daerah, dengan tujuan untuk mencapai suatu sasaran atau target tertentu dimasa yang akan datang.

Dasar dalam seluruh kegiatan dalam perencanaan akan terarah bila dilandaskan pada suatu perencanaan pembangunan yang dikontrol serta harus dievaluasi setiap seluruh kegiatan. Adapun pendapat dari Arthur W. Lewis (1965) dalam Syukrial Basri (2015) memandang suatu perencanaan merupakan suatu kumpulan program dan kebijakan pembangunan untuk merangkul masyarakat maupun pihak swasta agar dapat menggunakan sumber daya yang tersedia secara produktif dan masimal.

Sedangkan menurut pandangan dari Sondang P Siagian (1983) berpendapat dalam buku “Adminitrasi Pembangunan” mengatakan perencanaan merupakan suatu kegiatan atau proses yang dipikirkan secara matang terkait dari hal-hal yang akan dilakukan dimasa yang akan mendatang dengan kerangka agenda yang telah ditentukan. Hal tersebut menegaskan bahwa perencana merupakan suatu proses ataupun kegiatan (planning) untuk dimasa yang akan mendatang dengan pencapaian sasaran yang telah dibuat. Adapun pandangan dari perencanaan di Indonesia dimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengartikan suatu perencanaan dan pembangunan merupakan “sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN) adalah suatu Kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan,

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”.

Menurut Munir (2002: 41) dilansir dalam tesis Syaifullah (2008) menjelaskan bahwa berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 macam jenis perencanaan bagian, yakni :

1. Jangka panjang, perencanaan yang memiliki kurun waktu 10 sampai dengan 25 tahun. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan perspektif yang biasanya berisikan tentang arah-arrah pembangunan secara umum dan memiliki rentan waktu yang panjang.
2. Jangka menengah, perencanaan yang memiliki jangka waktu antara 4 sampai dengan 6 tahun. Perencanaan jangka menengah disusun oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah yang berisikan tentang penjabaran dari rencana jangka panjang sehingga memiliki sifat operasional.
3. Jangka Pendek, merupakan perencanaan yang memiliki kurun waktu hanya 1 tahun saja. Biasanya perencanaan pendek ini merupakan hasil dari penjabaran dari perencanaan menengah dan memiliki sifat yang akurat dibanding dengan perencanaan lainnya.

Namun jika dilihat dari praktek perencanaannya, dalam sejarah prakteknya perencanaan di Indonesia menggunakan pendekatan perencanaan komprehensif, bukan merupakan salah satu pendekatan corak perencanaan ataupun aliran. Ada beberapa macam corak perencanaan dalam praktek dikutip dalam jurnal Prof. Dr. Ir Achmad Djunaedi, MUP, sebagai berikut:

1. Perencanaan Komprehensif (Comprehensive Planning)

Perencanaan komprehensif merupakan analisis, penyeluruhan kedalam perencanaan komprehensif baik itu dilakukan dari aspek semua kehidupan kota, yang hasilnya berupa tata ruang dan fisik.

2. Perencanaan Induk (Master Planning)

Perencanaan Induk merupakan suatu perencanaan yang diterapkan ke dalam perencanaan kompleks bangunan kota baru secara fisik.

3. Perencanaan Strategis (Strategic Planning)

Pada perencanaan strategis memfokuskan lebih spesifik kedalam efisiensi yang tujuan spesifik, yaitu bisa dengan cara meniru cara perusahaan swasta untuk diterapkan pada gaya perencanaan publik, tanpa melakukan menswastakan kepemilikan publik.

4. Perencanaan Ekuiti (Equity Planning)

Pada tipe perencanaan ekuiti merupakan secara progresif untuk mempromosikan suatu kepentingan umum yang bersifat lebih besar (tidak hanya satu kelompok saja) dan sekaligus menentang perencanaan yang bersifat ketidakadilan di perkotaan.

5. Perencanaan Advokasi (Advocacy Planning)

Tipe perencanaan advokas ini merupakan sering disebut sebagai perencanaan yang memberi hak bersuara, yang mana terdapat rencana yang mewedahi kepentingan yang plural di masyarakat.

6. Perencanaan Inkrimental (Incremental Planning)

Perencanaan inkrimental merupakan perencanaan yang bersifat sepotong demi sepotong yang menggunakan perbandingan erbatas dari kumpulan hasil-hail berurutan dengan tujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pada jangka pendek yang bersifat realistik.

Dari berbagai pandangan para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan proses yang berisi tentang rencana dan pemikiran-pemikiran kedepan suatu daerah secara matang yang dapat

mewujudkan pengambilan suatu keputusan sebagai salah satu tahap persiapan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

6.2.2 Pengertian pembangunan

Adapun pandangan dari para ahli dalam mengartikan atau mendefinisikan pembangunan dilansir dalam Syaifullah (2008) yaitu sebagai berikut:

1. Menurut pandangan dari Ketz (1971) menyatakan pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang bersifat terencana dari satu institusi nasional terhadap institusi nasional lainnya yang lebih tinggi.
2. Menurut pandangan Esman (1991) mendefinisikan bahwa hakikat dari pembentukan perencanaan merupakan kemajuan yang sangat baik dan bersifat terus-menerus untuk menuju perbaikan kondisi dan kelayakan kehidupan manusia.
3. Tadro (1986) menjelaskan bahwa definisi pembangunan merupakan suatu proses untuk menuju perbaikan taraf kemanusiaan atau masyarakat secara keseluruhan dan bersifat dinamis.
4. Menurut Munir (2002) menyatakan bahwa hakikatnya suatu pembangunan merupakan “Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada

kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas dari daerah dalam proses pembangunan”.

Dari bebrapa pernyataan terkait dengan perencanaan dilihat dari sudut pandang para ilmuwan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan daerah merupakan usaha suatu instansi yang prosesnya terencana sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya dan tersusun dalam kerangka otonomi daerah yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

6.3 E-Government

6.3.1 Pengertian *E-Government*

Menurut Hardiansyah (2011) mengatakan bahwa pengertian *e-government* secara terminologi adalah suatu kelompok konsep yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk seluruh tindakan mencangkup dalam sektor publik, yang mana ditujukan untuk meningkatkan proses dalam hal pelayanan publik agar terciptanya pelayanan yang efektif, efisien dan trasmaran.

Electronic Government merupakan sebuah cara korelasi antara masyarakat, pemerintah dan kalangan lainnya yang memiliki suatu kepentingan, dengan melibat berbagai aspek sebagai pengguna media

elektronik terutama teknologi informasi dan komunikasi dengan maksud untuk memperbaiki kualitas dalam hal pelayanan. Jadi e-goverenment adalah suatu media online berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik secara interaktif, efisien, dan efektif. *E-governmen* juga diciptakan agar menjadi suatu jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau pihak yang memiliki kepentingan (Indrajit, 2002).

Rachman, Eviana; Noviyanto (2017) mendefinisikan *E-government* merupakan suatu proses berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diaktori oleh sektor pemerintahan, yang memiliki tujuan untuk mengoptimalisasikan dalam proses pelayanan untuk masyarakat (publik) sehingga terciptanya transparansi, efektif dan efisien. Sehingga hal tersebut menjadi suatu pokok untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik atau *good government*. Sehingga dengan adanya pemberdayagunaan *e-government* suatu tahap atau cara untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah agar lebih baik (Muallidin, 2014).

Dari berbagai pandangan para ilmuan diatas maka vendor prangkat lunak terkemuka seperti SAP memiliki definisi yang cukup unik yakni : “*E-government is a global reform movement to promote internet use by government agencies and everyone who deals with them.*” (*E-government* adalah suatu gerakan reformasi global untuk

mempromosikan pengguna media internet oleh lembaga pemerintahan dan semua yang memiliki urusan dengan mereka) (Indrajit, 2002: 2-3).

Adapun dalam menerapkan e-goverenment dilansir dalam Indrajit (2005:18) dalam skripsi Maulana Ariyanto (2015:58-59) menjelaskan bahwa ada enam komponen yang harus dilihat dalam penerapan e-goverenment yakni:

1. *Content Development* (pengembangan Aplikasi), merupakan terkait dengan pengembangan suatu aplikasi atau perangkat lunak, kesepakatan atarmuka pengguna, pemilihan standar teknis, spesifikasi sistem basis data, pengguna bahasa pemerograman, dan lain sebagainya.
2. *Competency Building* (pelatihan dan pengembangan kompetensi), merupakan terkait bagaimana pelatihan serta pengembangan potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang berada pada lingkup pemerintah (pengguna e-goverenment).
3. *Connectivity* (ketersediaan infrastruktur), merupakan terkait bagaimana suatu e-goverenment tersebut dapat berjalan dengan baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan program tersebut.
4. *Cyber Laws* (kerangka dan perangkat hukum), merupakan keberadaan hukum serta aturan yang mengatur dan

dibelakukannya suatu aturan dengan tujuan untuk mendukung segala aktivitas penerapan e-goverenment.

5. *Citizen Interfaces* (pengadaan SDM dan pengembangan kanal akses), merupakan terkait tentang pengadaan SDM dan kanal akses yang dapat digunakan dan diakses oleh seluruh kalangan masyarakat serta stakeholder e-goverenment.
6. *Capital* (pola permodalan), merupakan terkait dengan pola atau struktur penerapan e-goverenment yang diimplementasikan yang berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan setelah berjalannya program tersebut.

Jadi dari berbagai pandangan para ilmuwan diatas dalam mendefinisikan e-governmen, dapat disimpulkan bahwa e-governmen adalah suatu media online yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan sebagai jembatan pemerintah untuk ditujukan kepada pengguna (masyarakat atau pihak yang terkait) sehingga terciptanya proses pelayanan yang efektif, efisien dan trasparan.

6.3.2 Pengembangan *E-Government*

Pengembangan *E-government* adalah suatu usaha untuk meningkatkan penyelenggaraan dalam lingkup pemerintah menggunakan elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan dan

optimalisasi dalam ranah pelayanan publik sehingga terciptanya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien, hal tersebut diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Melalui pengembangan *e-government* maka pemerintah harus melakukan perbaikan dalam sistem manajemen sehingga dapat mengoptimalkan pengguna sistem teknologi dan informasi. Dalam pengembangan *e-governmen*, menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dapat dilakukan melalui 4 (empat) tingkatan, antara lain :

1. Tingkatan 1, Persiapan :

- Pembuatan suatu situs informasi pada setiap lembaga negara yang turut serta dalam pengembangan *e-government*;
- Mempersiapkan sumber daya manusia dengan tujuan untuk mendukung penerapan atau pengembangan *e-government*;
- Mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaksesan agar lebih mudah;
- Melakukan sosialisasi sistem web ditujukan untuk kalangan eksternal ataupun internal.

2. Tingkatan 2, Pematangan :

- Adanya pembuatan situs informasi untuk publik;

- Adanya pembuatan antar muka yang menghubungkan dengan lembaga lainnya.
3. Tingkatan 3, Pemantapan :
- Adanya pembuatan situs berbasis transaksi dalam hal untuk pelayanan publik;
 - Pembuatan interoperabilitas untuk suatu aplikasi atau data yang ada dengan lembaga lain.
4. Tingkatan 4, Pemanfaatan :
- Adanya pembuatan aplikasi yang ditujukan untuk pelayanan yakni seperti G2G, G2B dan G2C yang sudah terintegrasi.

Serupa dengan pembahasan diatas para ilmuwan Layne & Lee, (2001) membagi perkembangan *e-government* menjadi 4 (empat) model yaitu :

1. *Catalogue* merupakan suatu *website* yang dimiliki oleh pemerintah dibuat atau diciptakan dengan tujuan memberikan suatu informasi publik untuk masyarakat;
2. *Transaction* merupakan konsumen *website* dapat menggunakan *fitur website* selama proses pelayanan publik yang tersedia secara *online*;
3. *Vertical Integration* merupakan bergerak yang difungsikan sebagai penyedia layanan fungsional sejenis; dan

4. *Horizontal Integration* merupakan sebagai pemegang atau admin yang mengatur seluruh unit-unit layanan berbasis *online* dalam satu portal.

6.3.3 Jenis-Jenis *E-Government*

Menurut pandangan Indrajit (2002) jenis-jenis *e-government* terbagi menjadi 4 layanan, yakni :

1. *Government to Citizens (G2C)*

Tipe *government to citizens* atau sebutan singkatnya tipe G-to-C merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum, karena aplikasi ini memiliki tujuan sebagai perbaikan hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat (rakyat) melalui beberapa macam akses fitur sehingga pemerintah mampu menjangkau masyarakatnya dalam hal pelayanan sehari-hari.

2. *Government to Business (G2B)*

Government to bussiness adalah suatu kegiatan dalam bentuk transaksi-transaksi, ditujukan untuk pembisnis yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan agar jalannya perekonomian di suatu negara kondusif dan berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukan hubungan relasi yang baik antara pemerintah dengan berbagai kalangan bisnis, bukan hanya dalam hal memperlancar elit pembisnis dalam menjalankan bisnisnya, namun yang lebih tepatnya dalam hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika

terjadi hubungan dan relasi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

3. *Government to Government (G2G)*

Government to Government adalah suatu layanan yang digunakan oleh pemerintah, diperuntukkan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar departemen melalui basis data terintegrasi. Sehingga dengan adanya media *Government to Government* atau singkatnya disebut dengan G-to-G ini sehingga pemerintah pusat dapat dengan mudah mengontrol atau menjangkau daerah-daerah.

4. *Government to Employee (G2E)*

Government to Employee atau lebih singkat disebut dengan tipe *e-government* G-to-E ini adalah suatu aplikasi *e-government* yang diperuntuk pegawai negeri atau karyawan pemerintah. Adapun tujuan dari aplikasi tersebut digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan suatu kinerja serta untuk kesejahteraan pegawai yang berada diranah pemerintah yang bekerja disuatu institusi pelayanan masyarakat.

Dari keempat layanan yang tertera diatas, penulis memfokuskan pembahasan yang mendalam terkait penerapan *Government to government* atau lebih singkat disebut dengan G2G. Alasan penulis menggunakan *government to government* atau lebih singkatnya

disebut G2G ini karena menurut peneliti pembahasan G2G lebih relevan dibanding jenis layanan lainnya. Dimana *E-planning* adalah aplikasi diprogramkan dari pemerintahan pusat untuk pemerintah daerah agar memudahkan dalam proses pengerjaan suatu perencanaan daerah.

Government to government dapat mempermudah pemerintah pusat dalam mengontrol kegiatan yang berada daerah-daerah sehingga dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien dan transparan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut didukung dengan jurnal penelitian dari Habibi, M. (2018) menjelaskan bahwa penerapan e-government yang diterapkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur, dalam melaksanakan kegiatan Musrenbang yang merupakan suatu kegiatan melaksanakan serta perumuskan perencanaan pembangunan bersama instansi pemerintah daerah, kalangan swasta dan bersama masyarakat dengan menggunakan basis TIK yaitu melalui sistem aplikasi e-planning.

6.3.4 Implementasi *E-Government (E-Planning)*

Implementasi diartikan sebagai suatu penerapan atau pelaksana suatu kebijakan yang dijalankan oleh beberapa kelompok atau individu. Jika dikaitkan dengan kebijakan publik maka implementasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas penerapan kebijakan yang dilakukan

oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut pandangan Wahab (2001), implementasi diartikan sebagai implementasi yang dilaksanakan oleh beberapa suatu kelompok atau individu tertentu baik dikalangan pemerintah maupun non-pemerintah untuk mencapai suatu kebijakan yang telah menjadi ketetapan.

Sedangkan menurut pandangan Dunn (2003), mengartikan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan suatu tindakan untuk mengendalikan kebijakan dibatasi dengan waktu tertentu. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua yaitu langsung mengimplementasi dalam bentuk program atau dengan turunan dari kebijakan tersebut. Dalam menjalankan suatu kebijakan dapat diamat secara nyata melalui aktivitas yaitu kebijakan yang diturunkan melalui program, kemudian dilanjutkan melalui suatu proyek, dan terakhir diimplementasikan dengan suatu kegiatan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan penerapan atau tindakan untuk menjalankan suatu kebijakan oleh suatu kelompok atau individu baik dari kalangan pihak swasta atau pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan atau ketetapan tidak akan bisa dilaksanakan apabila

tujuan dan sasaran diciptakannya suatu kebijakan belum ditetapkan.

Adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasi *e-government* menurut Hardjaloka (2014) yang dikutip dalam (Purnomo, 2018), antara lain :

1. Korupsi, banyaknya kasus korupsi yang melanda dalam pemerintahan Indonesia hal tersebut disebabkan karena banyaknya permainan monopoli yang dilakukan oleh penguasa, sehingga penguasa ingin memegang seluruh kuasa (power) dan mereka ingin mengendalikan segala potensi yang ada di negara Indonesia.
2. Maraknya pendiskriminasi wewenang oleh beberapa oknum pejabat negara, hal tersebut menyebabkan maraknya KKN.
3. Terakhir, minimnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah dan tanggungjawab pejabat pemerintahan. Dimana dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup pemerintah daerah atau pusat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan keterbukaan pemerintah.

Dikutip dalam buku Indrajit, (2002), bahwa perkembangan konsep *E-government* dipengaruhi 3 (tiga) pemicu utama, yakni :

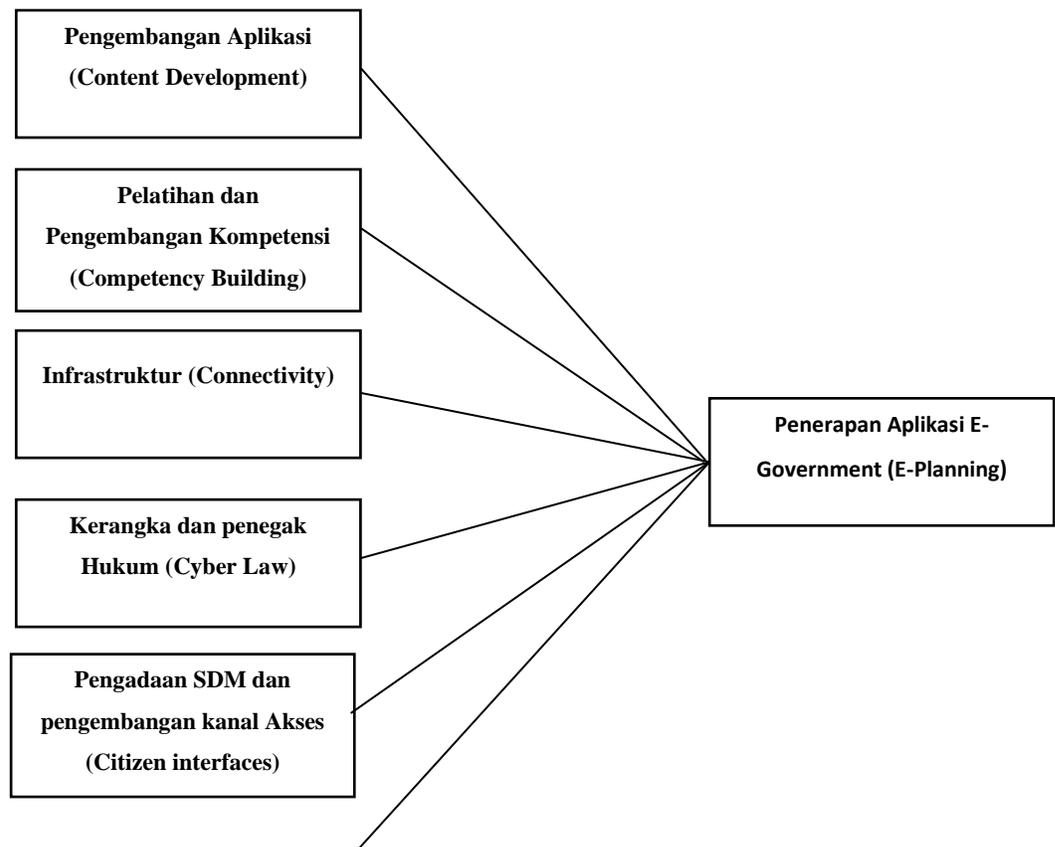
1. Era globalisasi, era globalisasi merupakan salah satu menjadi pemicu berkembang pesatnya *e-government*, hal tersebut disebabkan adanya pembuatan isu-isu yang berkaitan dengan

demokrasi, korupsi, HAM, *good corporate government*, ekonomi dan lain-lainnya itu menjadi pokok utama yang diperhatikan oleh setiap bangsa di dunia jika hal tersebut tidak ingin ditinggalkan dari pergaulan dunia. Dalam hal ini pemerintah harus lebih mereposisi perannya didalam sebuah negara, hal ini disebabkan pada zaman dahulu dimana kekuasaan selalu terletak pada pemerintahan pusat namun saat ini bergeser ke masyarakat, sehingga menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin tinggi.

2. Kemajuan teknologi informasi pada saat ini sangat cepat sekali, dimana informasi, data serta pengetahuan dapat didapatkan dari berbagai belahan dunia dalam hitungan detik saja. Dalam hal ini maka tentu saja dampak dari teknologi sekarang sangat berpengaruh dalam hal bagaimana pemerintah melayani kebutuhan masyarakatnya, sehingga secara tidak langsung banyak dari aspek dan fungsi pemerintah diambil alih oleh masyarakat, misalnya dalam permasalahan pers, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Oleh sebab itu dengan adanya kemajuan teknologi inilah pemerintah harus mengkaji semua fenomena yang ada sehingga yang bersangkutan dapat lebih efektif dan benar dalam memposisikan dirinya.

3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari perbaikan kinerja industri, swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Semakin dalamnya komunikasi yang dibuat antara masyarakat dengan perilaku ekonomi hal tersebut membuat semakin terbentuklah proses pelayanan yang semakin membaik. Cepatnya suatu kinerja di suatu sektor swasta tidak diikuti dengan percepatan yang sama di sektor publik, sehingga hal tersebut dapat dilihat oleh masyarakat bahwa adanya ketidakseimbangan dalam standar kualitas pemberi layanan.

7. Gambar Kerangka Teoritik



Pola permodalan (Capital)

Sumber: Diambil dari Teori Penerapan E-government (E-Planning) oleh Indrajit (2005)

8. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu konsep yang menjelaskan inti variabel yang akan dijelaskan atau untuk dijadikan sebagai pusat penelitian dalam struktur proposal sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mengoptimalkan penelitian. Agar mudah untuk memahami dalam penafsiran yang akan diteliti, maka akan ditemukan beberapa pengertian atau definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, sebagai berikut :

8.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang memiliki sifat yang mengikat dan memaksa setiap keputusan tersebut diambil, adapun keputusan tersebut dibuat dan dipilih oleh lembaga pemerintah, hal tersebut menjadi suatu pedoman atau pegangan bagi aparatur pemerintah yang menjalaninya sehingga pada saat menciptakan suatu kebijakan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan kebijakan yang sebagaimana mestinya.

8.2 Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses yang berisi terkait tentang rencana dan pemikiran-pemikiran kedepan suatu daerah atau wlayah secara matang sehingga dapat mewujudkan pengambilan suatu keputusan sebagai salah satu tahap persiapan untuk mencapai tujuan dan tepat pada sasaran.

8.3 Penerapan E-Government (E-Planning)

Penerapan E-planning adalah suatu tindakan berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh suatu individu maupun kelompok instansi yang terkait berdasarkan kebijakan yang berlaku dengan tujuan untuk mengoptimalkan penyusunan suatu program perencanaan dan pembangunan daerah.

9 Definisi Operasional

Definisi operasional dalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Karena dari informasi tersebut peneliti dapat melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama.

Tabel 1. 2

Definisi Operasional

| Dimensi | Variabel | Parameter/Indikator |
|----------------|-----------------|----------------------------|
|----------------|-----------------|----------------------------|

| | | |
|------------------------|--|---|
| Penerapan E-Government | Content Development (pengembangan aplikasi) | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh Bappeda - Adanya standarisasi teknis dalam e-goverenment |
| | Competency building (Pelatihan dan pengembangan kompetensi) | <ul style="list-style-type: none"> - Diadakannya pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai yang ikut penerapan e-goverenment |
| | Connectivity (Infrastruktur) | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya sarana dan prasarana yang memadai |
| | Cyber Laws (Kerangka dan Perangkat Hukum) | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya dasar hukum dalam menerapkan kebijakan e-goverenment |
| | Citizen interfaces (Pengadaan SDM dan Pengembangan Kanal Akses) | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya dilakukan pengadaan SDM - Adanya penilaian kualitas SDM - Adanya diterapkan pengembangan kanal akses |
| | Capital (Pola Permodalan) | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya biaya/anggaran |

10 Metode Penelitian

10.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengerjaan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan olah data NVIVO 12 Plus. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang hasil akhirnya berisi tentang penentuan-penentuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi namun dapat dicapai dengan metode penguasaan pemahaman melalui teori yang sudah diterapkan (Almanshur, 2016). Jenis metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta memahami secara deskriptif bagaimana penerapan aplikasi *e-planning* dalam meningkatkan perencanaan dan pembangunan daerah oleh Bappeda Kabupaten Bangka Selatan tahun 2017-2018.

10.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang digunakan peneliti untuk meneliti masalah-masalah yang ada, dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang real/valid yang didapatkan dari responden. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung tepatnya pada BPPPPD bagian perencanaan dan pembangunan. Karena di Kabupaten Bangka Selatan telah menerapkan aplikasi *e-planning* dari tahun 2017 hingga sekarang, namun selama penerapan terdapat permasalahan-permasalahan sehingga peneliti tertarik meneliti serta mengkaji terkait bagaimana proses penerapan aplikasi *e-plannig* dalam meningkatkan perencanaan dan pembangunan daerah oleh BPPPPD Kabupaten Bangka selatan pada tahun 2017-2018.

10.3 Unit Analisis Penelitian

Unit analisis penelitian digunakan peneliti sebagai subjek peneliti atau sesuatu yang berkaitan dengan komponen/fokus peneliti. Adapun tujuan unit analisis yang dilakukan peneliti agar validitas dan reabilitas subjek penelitian data terjaga dengan baik. Unit analisis dapat berupa suatu individu, suatu kelompok, atau suatu organisasi yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian. Adapun unit analisis yang menjadi komponen peneliti dalam judul yaitu “Penerapan Aplikasi E-Planning Dalam Meningkatkan Perencanaan dan Pembangunan Oleh BPPPPD di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2018” adalah semua OPD yang

membidangi perencanaan di Kabupaten Bangka Selatan yang mana aplikasi e-planning tersebut yang menginput semua dokumen perencanaan setiap OPD. Aplikasi e-planning berpusat di BPPPPD, dimana BPPPPD memiliki wewenang untuk menentukan batas kegiatan serta batas anggaran yang diajukan oleh setiap OPD.

10.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

10.4.1 Data Primer

Seperti yang dikatakan oleh Moleong (2010) dalam skripsi (Anggraini, 2018) mengatakan data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari narasumber yang menjadi sasaran penelitian. Data primer ini bisa kita dapatkan melalui beberapa cara yaitu melalui tahap wawancara, observasi dan kuisioner terhadap narasumber yang terlibat dalam penerapan aplikasi *E-Planning* oleh BPPPPD di Kabupaten Bangka Selatan serta dinas-dinas terkait dalam penerapan.

10.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung oleh peneliti, peneliti bisa mendapatkan data tersebut melalui buku, *literatur*

review dan karya ilmiah yang dibutuhkan selama penelitian berlanjut hanya bersifat sebagai pelengkap data yang diperoleh oleh peneliti. Sesuai dengan definisi menurut Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang diberikan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

11 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap atau strategi peneliti dalam mengambil dan memperoleh suatu data real terkait variabel yang dijadikan penelitian. Pengumpulan data juga dapat diartikan sebagai suatu tahapan untuk menguji data yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) tahap penelitian, antara lain :

11.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dialog yang dilakukan sebanyak 2 (dua) orang atau lebih, yaitu pewawancara (interviewer) terhadap pewawancara (narasumber) demi untuk mendapatkan suatu informasi (Arikunto, 2010: 198). Wawancara digunakan oleh peneliti dengan tujuan mengetahui keadaan seseorang. Wawancara dilakukan dengan menciptakan suatu keadaan

dimana narasumber harus merasakan dalam keadaan nyaman, santai tetapi harus serius. Hal tersebut sangat perlu dilakukan agar narasumber menjawab semua hal yang kita ingin tanyakan terkait penelitian secara jujur.

Menurut Sugiono (2012) dalam mengartikan teknik penelitian kualitatif, teknik yang sering digunakan yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan data atau sampel dengan pertimbangan tertentu atau pengambilan orang yang dianggap paling tau terkait dengan apa yang kita harapkan. Sedangkan teknik *snowball sampling* yaitu pengambilan sampel yang pada awalnya berjumlah sedikit lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel penelitian. Karena peneliti merasa sampel yang diambil dan dinilai paling mengetahui bagaimana penerapan aplikasi baik di lingkup BPPPPD (pertanggung jawab dan pengguna) dan OPD (pengguna) di Kabupaten Bangka Selatan. Berikut penulis menyertakan beberapa narasumber yang akan di wawancarai :

Tabel 1. 3

Sasaran Narasumber

| No | Nama | Jabatan | Status Informan |
|-----------|-------------|----------------|------------------------|
|-----------|-------------|----------------|------------------------|

| | | | |
|----|------------------------|---|--------------|
| 1. | Herman, SP., M.ENG | Kepala Badan BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan | Kepala Badan |
| 2. | Imam Mubarak, S.STP | Ketua Bidang Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah | Master Admin |
| 3. | Andri, S.ST | Ketua Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Admin Bidang |
| 4. | Yuri Siswanto, S.ST | Ketua Bidang Perekonomian dan SDA | Admin Bidang |
| 5. | Hendrawan, ST | Ketua Bagian Sosial Budaya dan Pemerintahan | Admin Bidang |
| 6. | Eka | Staf Perencanaan | Admin OPD |
| 7. | Agustian | Staf Perencanaan | Admin OPD |
| 8. | Miko Anggriawan | Staf Perencanaan | Admin OPD |

11.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan yang memanfaatkan catatan-catatan yang mencakup tentang apa yang ingin diteliti, sehingga mendapatkan data yang sah, akurat, lengkap dan bukan berdasarkan hasil dari

pemikiran sendiri (Basrowi dan Suwandi, 2008:158). Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti yaitu seperti, aktikel atau berita, buku, media massa, jurnal, skripsi, dan disertasi yang berkaitan tentang pembahasan dalam penelitian.

11.3 Observasi

Menurut pandangan dari Nasution dalam Sugiyono, (2012:226) menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu dasar dari segala bentuk ilmu pengetahuan, karena peneliti dapat mendapatkan data melalui dari tinjauan secara langsung, sehingga peneliti mendapatkan data secara fakta dilapangan yang diperoleh dari proses observasi. Sedangkan menurut pandangan dari Basrowi dan Suwandi, (2008:94) menjelaskan bahwa observasi adalah suatu metode yang dikerjakan oleh visual sehingga data yang didapatkan sangat bergantung pada observer. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, yang mana peneliti tidak ikut segala kegiatan namun peneliti hanya datang ketempat instansi yang ingin diteliti.

12 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berbasis software CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software) atau sering disebut dengan NVIVO yang ditujukan untuk membantu peneliti kualitatif secara efektif dan efisien, sehingga membantu peneliti untuk menganalisis data dengan memberikan fasilitas untuk menganalisis berupa konten. Berikut adalah indikator-indikator dalam teknik analisis data menggunakan NVIVO :

1. *Fitur Create New Project* atau pembuatan proyek baru

Pembuatan projek baru adalah dimana peneliti memberikan judul *riset* yang sedang diteliti yaitu “Penerapan Aplikasi E-Planning dalam meningkatkan Perencanaan dan Pembangunan Daerah oleh Bappeda di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2018”, terus dilanjutkan dengan mencantumkan beberapa literatur review yang digunakan peneliti untuk mendukung riset dalam penelitian.

2. Fitur Import

Fitur import adalah digunakan untuk memasukkan data internal, eksternal dan memos. Adapun data eksternal berupa data yang berupa *link* yang berasal dari *could* atau yang sering disebut dengan data *hyperlink*. Data memos adalah data yang berupa catatan-catatan kecil yang dibuat oleh peneliti. Dalam penelitian ini, untuk data eksternal dapat berupa artikel, jurnal serta buku yang dapat mendukung penelitian. Data Internal merupakan data skunder dan primer yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan yang disimpan dalam bentuk *disk*. Adapun data memos merupakan suatu catatan pertanyaan yang dibuat oleh peneliti sebelum melakukan penelitian ke instansi terkait.

3. Fitur Node

Fitur Node adalah fitur yang digunakan oleh peneliti untuk mengelompokkan dan mengklarifikasi data pada proses *coding* (Proses pengkodean), seperti pengimputan dan proses data dalam penerapan

aplikasi e-plannig akan diberikan tanda yaitu tanda warna yang berbeda agar berfungsi sebagai mempermudah dalam pengelompokkannya.

4. Fitur Cases

Fitur Case merupakan fitur yang digunakan oleh peneliti untuk mengisi nama atau jabatan narasumber. Adapun fungsi dari cases merupakan memudahkan peneliti dalam menganalisis suatu indikator dalam NVIVO.

5. Setelah data tersebut masuk dalam pemrosesan, maka data tersebut masuk dalam tahap klarifikasi. Maka hasil dari data penelitian terkait penerapan aplikasi e-planning dalam meningkatkan perencanaan dan pembangunan oleh Bappeda di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2017-2018 akan diolah menggunakan fitur *query*, dimana dalam fitur *query* terdapat beberapa fitur lain didalamnya seperti text search digunakan untuk mencari beberapa kata yang sama didalam beberapa data lainnya, *word frequency* guna untuk mencari kata yang sering muncul baik dalam 1 node atau lebih dan yang terakhir word tree untuk melihat pohon hubungan antara kata yang sering muncul dengan kata lainnya. Sehingga hal tersebut akan memudahkan peneliti untuk menganalisis hasil penemuan jika kata-kata sudah dikelompokkan dengan sejenisnya. Adapun fitur yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian yakni seperti fitur *cluster analysis* dan *crosstab query* yang mana kedua fitur tersebut digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data wawancara yang akan ditampilkan pada pembahasan.